

Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar

Mirna Indriani¹, Nadirsyah², Heru Fahlevi³, Safrida Putri⁴

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

Abstract. *This research was conducted to investigate whether the level of community participation influences the quality of village financial management. Tests were carried out on 144 samples consisting of community elements namely hamlet heads (kepala dusun), BPDes/tuha peut, PKK, youth leader, imeum meunasah, panglima laot, and ketua blang/farmer representative. Data collection is done by distributing questionnaires. Data were analyzed using structural equation models using LISREL 8.80 software. The results showed that the level of community participation has a positive relationship to the quality of village financial management means that the higher the level of community participation, the better the quality of village financial management.*

Keywords. *Village Funds, Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), Citizen Participation, Quality of Village Financial Management.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi apakah tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Pengujian dilakukan pada 144 sampel yang terdiri dari unsur masyarakat yaitu kepala dusun, BPDes/tuha peut, PKK, ketua pemuda, imeum meunasah, panglima laot, dan ketua blang/perwakilan petani. Pengumpulan data dilakukan dengan pendistribusian kuesioner. Data dianalisis menggunakan model persamaan struktural dengan menggunakan *software LISREL 8.80*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa berarti bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci. Dana Desa, APBDes, Partisipasi Masyarakat, Kualitas Manajemen Keuangan Desa.

Corresponding author. Email: mirna_indriani@unsyiah.ac.id, nadirsyah@feb.unsyiah.ac.id, hfahlevi@gmail.com & safridaputriw@gmail.com

How to cite this article. Mirna Indriani, Nadirsyah, Heru Fahlevi, & Safrida Putri. 2019. Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 111–130.

History of article. Received: January 2019, Revision: Maret 2019, Published: April 2019

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i1.14827

Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Murtiono, 2016). Pengelolaan keuangan desa tidak hanya sekadar untuk menunjukkan adanya alokasi anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga harus mengedepankan asas tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari masyarakat, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah mereka sendiri (Fung, 2002; Samah & Aref, 2009). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan. Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan terjadi komunikasi antara masyarakat dan aparatur pemerintah. Komunikasi yang terbangun akan mendorong pemerintah membuat keputusan anggaran sesuai dengan prioritas dan nilai aktual masyarakat (Franklin, Ho, & Ebdon,

2009; Kahn & Kenney, 1997). Selain itu, partisipasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Halachmi & Holzer, 2010), akuntabilitas dan kinerja (Robert, 2002; Suebvises, 2018; Wampler, 2002), serta sustainable development goals. Hasil penelitian yang berbeda diungkapkan oleh Kazimoto (2013) yang menyatakan laporan keuangan yang dihasilkan dan didistribusikan kepada anggota masyarakat tidak menunjukkan aktivitas sesungguhnya padahal proses perencanaan keuangan telah melibatkan masyarakat. Penelitian Kazimoto (2013) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum memiliki efek positif bagi kinerja organisasi.

Hasil penelitian peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Ahrori (2011) yang menggunakan pendekatan kualitatif, menyatakan masyarakat sangat antusias dan merespon penyusunan pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga APBDes yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian yang dilakukan Rahayu (2010) juga menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat Kota Jambi dalam penyusunan APBD sudah baik. Berbeda dengan penelitian Ahrori (2011) dan Rahayu (2010), penelitian yang dilakukan oleh Syamsi (2014) menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wakan telah berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana desa, namun pengelolaan keuangan pada desa tersebut masih kurang baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya transparansi pertanggungjawaban anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat partisipasi semu (*pseudo participation*) seperti yang diungkapkan oleh Sopanah (2010) bahwa implementasi partisipasi masyarakat pada proses penyusunan APBD di kota Malang masih bersifat semu.

Penelitian ini akan menguji apakah tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian sebelumnya para peneliti lebih menekankan pada partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan

anggaran sedangkan penelitian ini melihat partisipasi dari ketersediaan mekanisme partisipasi dan kaitannya dengan kualitas pengelolaan keuangan dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan SEM (*Structural Equation Model*) sehingga hasil penelitian akan memperlihatkan keterkaitan antara konstruk yang dibangun terhadap partisipasi yang akan mempengaruhi secara dominan terhadap kualitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk pengembangan desa dan kebijakan dalam pengembangan partisipasi masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bagaimana organisasi berupaya untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi sesuai dengan keinginan masyarakat dimana organisasi tersebut berada. Organisasi mencoba untuk meyakinkan bahwa aktivitas yang dilakukan merespon nilai-nilai yang ada di lingkungan organisasi. Menurut Lindblom (1994) legitimasi adalah suatu kondisi atau status yang terjadi ketika sistem nilai entitas tertentu sesuai dengan sistem nilai yang lebih luas dimana entitas tersebut bagian dari sistem yang ada. Jika terjadi perbedaan, secara aktual atau potensial, oleh karena terdapat dua sistem nilai, maka akan terjadi ancaman terhadap legitimasi.

Partisipasi masyarakat berawal dari keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Menurut Kim & Schachter (2013) partisipasi akan mendorong terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat dengan aparat pemerintah. Partisipasi menjadi sebuah mekanisme legitimasi pemerintah karena anggaran yang dibuat sesuai dengan kondisi aktual masyarakat dan sistem nilai yang dianut serta keadilan dari sebuah proses (Franklin et al., 2009; Friedmann, 1973; Goulet, 1989; Healey, 1997; Illsley, 2003; Kahn & Kenney,

1997). Kebijakan yang dirumuskan melalui partisipasi menjadi lebih realistis karena didasarkan preferensi masyarakat. Disamping itu masyarakat menjadi evaluator bagi para aparatur pemerintah dalam membuat keputusan (Irvin & Stansbury, 2004).

Partisipasi merupakan proses dinamis yang sulit diukur dengan menggunakan pengukuran standar (Samah & Aref, 2009). Di Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan tidak dapat secara langsung diamati tetapi dapat dilakukan melalui dimensi pengelolaan keuangan yaitu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Republik Indonesia, 2014). Pada proses perencanaan, partisipasi dilakukan melalui peran aktif dalam tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Desa dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa, melalui partisipasi dalam mengikuti musyawarah desa dan musyawarah rencana pembangunan desa sehingga dapat memberikan opini dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian anggaran yang disusun telah mendapat legitimasi dari masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan tidak dapat langsung dilakukan karena pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi kegiatan pengeluaran dan penerimaan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan keuangan dapat terjadi jika pemerintah mengumumkan hasil kegiatan yang dilakukan melalui format yang mudah dipahami masyarakat. Dengan demikian masyarakat dengan mudah mengawasi dan menilai pelaksanaan penganggaran yang dilakukan. Ketika masyarakat tidak komplain terhadap apa yang terjadi maka proses legitimasi menjadi tercapai. Menurut Ramdan et al. (2015:71), pada pelaksanaan kegiatan, proses pengawasan dapat dilakukan melalui pemberian catatan kritis jika tidak sesuai dengan prioritas hak dasar masyarakat.

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran atau kegiatan yang nyaris dilakukan

sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggung jawab bendahara. Dokumen penatausahaan adalah dokumen resmi milik pemerintah desa yang dapat berfungsi sebagai sumber data untuk keperluan audit dan sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses hukum. Meskipun penatausahaan merupakan kerja administrasi yang terkait dengan pencatatan pembukuan keuangan yang seolah-olah tidak memiliki ruang partisipasi bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses penatausahaan keuangan desa adalah dengan meminta informasi, memberikan masukan, dan melakukan audit partisipatif, melakukan pemantauan dalam pelaksanaan belanja desa, serta bekerja sama dengan bendahara dalam merumuskan RAB dan menyelaraskan laporan kemajuan dana kegiatan Ramdan et al. (2015:86). Prinsip akuntabilitas dan keterbukaan yang dilakukan dalam penatausahaan merupakan proses legitimasi para aparatur sehingga sangat dibutuhkan sikap yang teguh, taat pada asas, serius, dan jujur dalam menjalankan tugas-tugas, sehingga kualitas pengelolaan keuangan tetap terjaga dengan baik.

Pelaporan sebagai suatu alat pengendali mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan secara periodik atas pencapaian pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai alat evaluasi. Pelaporan keuangan desa harus diupayakan selalu menyajikan data yang valid, akurat, terkini, sistematis, ringkas, sederhana, jelas dan tepat waktu sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa juga merupakan bagian dari mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik atau legitimasi terhadap apa yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Hurst (1970) dalam Deegan & Unerman (2006) yang menyatakan pelaporan menunjukkan keberadaan organisasi yang legitimate. Pengungkapan pelaporan memiliki hubungan dengan strategi organisasi serta harapan

komunitas, sehingga manajemen organisasi akan bereaksi terhadap perhatian utama komunitas tersebut (Deegan & Unerman, 2006).

Teori Institusional

Teori institusional memiliki kaitan yang erat dengan teori legitimasi. Pada teori institusional menyatakan bahwa ide atau gagasan pada lingkungan institusional yang membentuk bahasa dan simbol keberadaan dan penerimaan organisasi sebagai norma dalam konsep organisasi Zucker (1987) dalam Donaldson (1992). Ide-ide yang berpengaruh kemudian di institusionalkan dan dianggap sebagai cara berpikir organisasi tersebut melalui proses mekanisme yang legitimate. Meyer & Scott (1983) menyebutkan organisasi berada dalam tekanan berbagai kekuatan sosial sehingga organisasi perlu menyelaraskan struktur organisasi. Meyer & Scott (1983) menegaskan struktur organisasi tidak ditentukan oleh lingkungan tugas tetapi lebih dipengaruhi oleh situasi masyarakat secara umum sehingga bentuk organisasi ditentukan oleh legitimasi, efektifitas dan rasionalitas masyarakat.

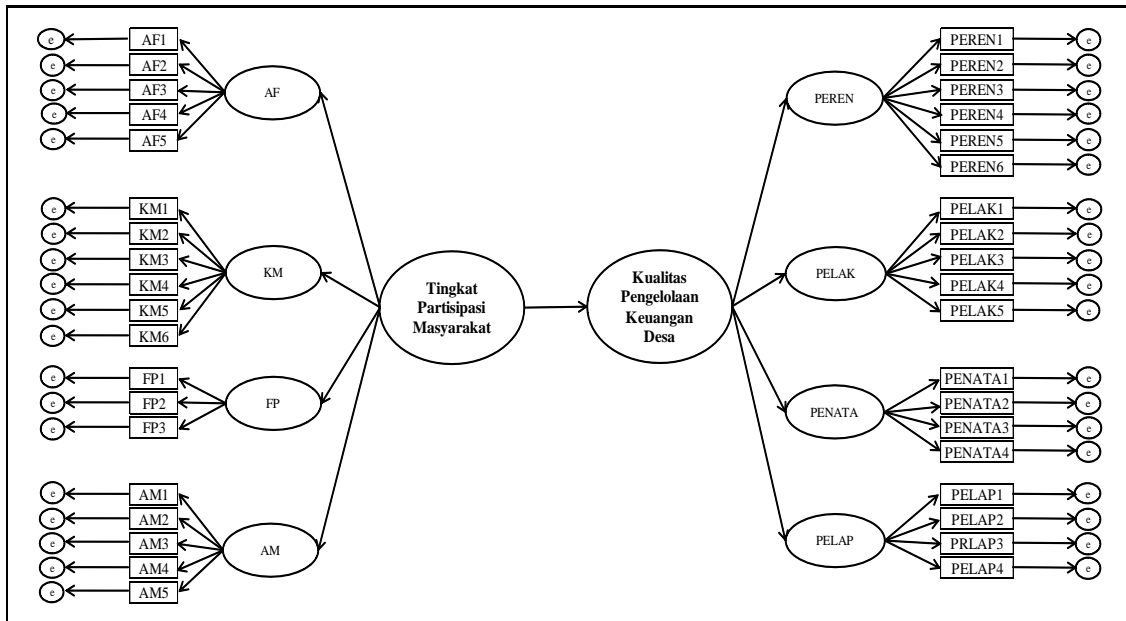
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa menjadi mekanisme bagaimana ide-ide dan gasasan pada lingkungan organisasi dapat diinternalisasikan dalam institusi. Partisipasi masyarakat menjadi mekanisme efektifitas organisasi desa dalam pengelolaan keuangan desa dan rasionalitas dalam melakukan tindakan.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

Partisipasi merupakan alat transformasi sosial perubahan (Nelson & Wright, 1995). Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan keputusan yang lebih baik (Beierle, 1999; Thomas, 1995). Partisipasi akan memberikan manfaat yang sangat besar pada pemerintah desa dan masyarakat desa karena partisipasi bisa membangun rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Dengan berpartisipasi akan menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat. Partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna terakomodasinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa (Waskitojati, Handoyo, Wuryaningsih, C. D. Prasetyo, & Luwihono, 2016:20).

Menurut teori legitimasi, partisipasi adalah merupakan sarana bagi pemerintah untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat oleh karena itu semakin tinggi partisipasi maka semakin baik keputusan yang dibuat termasuk pengelolaan keuangan. Pada teori institusional ide-ide masyarakat yang diperoleh melalui partisipasi diinternalisasikan sebagai sebuah program yang benar-benar dihasilkan dari perencanaan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mekanisme formal organisasi, oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kecamatan Mesjid Raya yaitu sebuah kecamatan yang berada pada Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Aceh. Kecamatan Mesjid raya memiliki 13 Desa. Ukuran sampel penelitian ini adalah 144 responden yang diambil secara *proportionate stratified random sampling* untuk mewakili unsur masyarakat desa pada setiap desa yang terdapat di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diantar langsung kepada para responden. Jika responden yang dituju tidak ada, maka peneliti mendatangi kembali pada waktu yang disepakati. Kesepakatan dilakukan melalui telepon langsung yang nomornya diperoleh dari kolega responden.

Pengukuran variabel pengelolaan keuangan desa menggunakan skala 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju) dimensi kegiatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Republik Indonesia, 2014). Pengukuran variabel partisipasi dengan skala 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju) padamasing-masing seluruh dimensi kegiatan pengelolaan keuangan.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM (*Structural Equation Model*) yang dioperasikan melalui program LISREL (*Linear Structural Relationships*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Responden

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah perwakilan masyarakat desa yang terdiri dari kepala dusun, tuha peut/BPDes, PKK, imeum meunasah, panglima laot/ketua teupin, ketua blang, ketua nelayan, ketua pemuda di 13 gampong pada kecamatan Mesjid Raya kabupaten Aceh Besar sebanyak 144 responden. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

No	Karakteristik Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	109	75,7

No	Karakteristik Responden	Frekuensi	Persentase (%)
	Perempuan	35	24,3
2	Usia		
	30-39 tahun	21	14,6
	40-49 tahun	42	29,2
	50-59 tahun	52	36,1
	≥60 tahun	29	20,1
3	Pendidikan Terakhir		
	SD/ sederajat	19	13,2
	SMP/ sederajat	32	22,2
	SMA/ sederajat	56	38,9
	Diploma	12	8,3
	Sarjana (S1)	18	12,5
	Pasca Sarjana (S2)	7	4,9
4	Pekerjaan		
	PNS	19	13,2
	Pegawai Swasta	17	11,8
	Wiraswasta	42	29,2
	Lain-lain	66	45,8
5	Jabatan		
	Kepala Dusun	29	20,1
	Tuha Peut/BPDes	54	37,5
	PKK	35	24,3
	Imeum Meunasah	8	5,6
	Panglima Laot/Ketua Teupin	8	5,6
	Ketua Blang/Nelayan	2	1,4
	Ketua Pemuda	8	5,6

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil tanggapan responden terhadap tingkat partisipasi dan pengelolaan keuangan dapat dilihat tabel 2 dan tabel 3.

Tabel 2.

Tanggapan Responden terhadap Variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat							
No	Pernyataan	Skor Jawaban					Rata-rata
		STS	TS	N	S	SS	
A	Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang representatif.						
1	Saya terlibat menjadi tim penyusunan RPJM desa.	3 2,1%	34 23,6%	17 11,8%	46 31,9%	44 30,6%	3,65
2	Saya terlibat menjadi tim penyusunan RKP desa.	4 2,8%	33 22,9%	20 13,9%	39 27,1%	48 33,3%	3,65
3	Saya terlibat menjadi tim pelaksana kegiatan pembangunan desa sebagai perwakilan dari kelompok masyarakat.	1 0,7%	10 6,9%	38 26,4%	60 41,7%	35 24,3%	3,82

No	Pernyataan	STS	Skor Jawaban				Rata-rata
			TS	N	S	SS	
4	Saya ikut berpartisipasi dalam musyawarah perubahan prioritas kegiatan RKP desa.	1 0,7%	4 2,8%	23 16,0%	60 41,7%	56 38,9%	4,15
5	Saya mengusulkan kegiatan yang sudah disepakati dari musyawarah tingkat dusun dalam Musdes dan Musrenbangdes.	3 2,1%	12 8,3%	48 33,3%	44 30,6%	37 25,7%	3,69
Rata-rata							3,79
B Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.							
1	Saya memonitor setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh desa.	3 2,1%	11 7,6%	42 29,2%	54 37,5%	34 23,6%	3,73
2	Saya pernah mengoreksi pelaksanaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan perencanaan.	3 2,1%	19 13,2%	38 26,4%	60 41,7%	24 16,7%	3,58
3	Saya mengawasi pelaksanaan mutu pekerjaan yang sedang berjalan.	3 2,1%	14 9,7%	57 39,6%	42 29,2%	28 19,4%	3,54
4	Saya mengawasi proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa saya serta mengawal kesesuaian harganya dengan kondisi lokal desa.	0 0%	22 15,3%	43 29,9%	43 29,9%	36 25,0%	3,65
5	Saya mengkritisi, mengoreksi, dan mengklarifikasi laporan pertanggungjawaban dan laporan pemanfaatan kekayaan milik desa.	0 0%	12 8,3%	43 29,9%	59 41,0%	30 20,8%	3,74
6	Saya melakukan kontrol terhadap penyusunan	1 0,7%	8 5,6%	30 20,8%	70 48,6%	35 24,3%	3,90

No	Pernyataan	STS	Skor Jawaban			SS	Rata-rata
			TS	N	S		
	Rancangan Anggaran Belanja (RAB) agar tidak terjadi <i>mark-up</i> anggaran.						
						Rata-rata	3,69
C	Fokus pemerintah desa adalah memberikan arahan dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi.						
1	Saya mengetahui/diundang dalam musyawarah desa.	0 0%	0 0%	13 9,0%	61 42,4%	70 48,6%	4,40
2	Saya mengetahui/diundang dalam musyawarah rencana pembangunan desa.	0 0%	0 0%	11 7,6%	51 35,4%	82 56,9%	4,49
3	Saya mengetahui/diundang dalam forum-forum pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan pemanfaatan kekayaan milik desa.	0 0%	1 0,7%	18 12,5%	62 43,1%	63 43,8%	4,30
						Rata-rata	4,40
D	Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa.						
1	Saya sering memberikan pendapat atau opini dalam penyusunan anggaran.	0 0%	10 6,9%	41 28,5%	52 36,1%	41 28,5%	3,86
2	Saya bekerja sama dengan bendahara desa dalam merumuskan RAB dan menyelaraskan laporan kemajuan dana kegiatan pada Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Buku Kas Umum di desa.	12 8,3%	57 39,6%	44 30,6%	15 10,4%	16 11,1%	2,76
3	Saya sering bertanya dan meminta penjelasan terkait laporan pertanggungjawaban dalam setiap forum.	0 0%	8 5,6%	36 25,0%	67 46,5%	33 22,9%	3,87

No	Pernyataan	STS	Skor Jawaban				Rata-rata
			TS	N	S	SS	
4	Saya mengawal dan memberikan masukan kritis terhadap penyusunan perubahan APBDes.	2 1,4%	17 11,8%	30 20,8%	63 43,8%	32 22,2%	3,74
5	Saya mencermati Berita Acara usai melaksanakan Musdes dan Musrenbangdes dan meminta salinan hasilnya.	19 13,2%	38 26,4%	32 22,2%	26 18,1%	29 20,1%	3,06
						Rata-rata	3,46
						Rata-rata Total	3,84

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki rata-rata 3.84 yang menunjukan bahwa masyarakat belum maksimal dalam berpartisipasi terutama dalam akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa yang ditandai dengan nilai

rata-rata skor jawaban responden 3,46 masyarakat juga belum mampu terlibat secara baik dalam pembuatan keputusan yang terlihat dari rata-rata skor jawaban responden sebesar 3,69 walaupun pemerintah telah memberikan arahan dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dengan skor 4,40.

Tabel 3. Tanggapan Responden terhadap Variabel Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

No	Pernyataan	STS	Skor Jawaban				Rata-rata
			TS	N	S	SS	
A Perencanaan							
1	APBDes di desa saya selama ini telah berpihak kepada kepentingan publik.	2 1,4%	4 2,8%	19 13,2%	62 43,1%	57 39,6%	4,17
2	Pemantauan APBDes di desa saya sepenuhnya kewenangan masyarakat.	0 0%	4 2,8%	32 22,2%	63 43,8%	45 31,3%	4,03
3	Di desa saya ada penyelenggaraan Musyawarah Desa.	0 0%	0 0%	13 9,0%	63 43,8%	68 47,2%	4,38
4	Di desa saya ada penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.	0 0%	0 0%	10 6,9%	55 38,2%	79 54,9%	4,48
5	Di desa saya ada pembentukan tim penyusunan RPJMDes dan tim RKPDes.	0 0%	0 0%	16 11,1%	55 38,2%	73 50,7%	4,40
6	Di desa saya ada dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.	0 0%	0 0%	27 18,8%	62 43,1%	55 38,2%	4,19
						Rata-rata	4,28
B Pelaksanaan							
1	Setiap transaksi belanja di desa saya	0	1	24	72	47	4,15

No	Pernyataan	STS	Skor Jawaban			Rata-rata	
			TS	N	S		SS
	ada di dalam peraturan desa tentang APBDes.	0%	0,7%	16,7%	50,0%	32,6%	
2	Setiap transaksi penerimaan dan belanja di desa saya didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	0 0%	1 0,7%	21 14,6%	71 49,3%	51 35,4%	4,19
3	Seluruh bukti transaksi mendapat pengesahan oleh kepala desa.	0 0%	0 0%	19 13,2%	71 49,3%	54 37,5%	4,24
4	Di desa saya ada sosialisasi tentang peraturan desa.	0 0%	3 2,1%	36 25,0%	69 47,9%	36 25,0%	3,96
5	Di desa saya ada sosialisasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.	0 0%	4 2,8%	25 17,4%	71 49,3%	44 30,6%	4,08
						Rata-rata	4,12
C Penatausahaan							
1	Di desa saya ada dokumen penatausahaan yang berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, dan bukti transaksi.	0 0%	1 0,7%	21 14,6%	67 46,5%	55 38,25	4,22
2	Desa saya memiliki seluruh dokumen transaksi penerimaan dan belanja desa.	0 0%	1 0,7%	25 17,4%	77 53,5%	41 28,5%	4,10
3	Setiap transaksi penerimaan dan belanja desa telah tercatat pada dokumen pencatatan.	0 0%	0 0%	16 11,1%	77 53,5%	51 35,4%	4,24
4	Di desa saya ada pengeluaran desa yang dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan.	0 0%	3 2,1%	34 23,6%	68 47,2%	39 27,1%	3,99
						Rata-rata	4,14
D Pelaporan dan pertanggungjawaban							
1	Laporan Keuangan Desa di desa saya disusun oleh bendahara desa.	0 0%	9 6,3%	24 16,7%	69 47,9%	42 29,2%	4,00
2	Tahapan pelaporan keuangan di desa saya dilakukan dalam dua tahapan yaitu pada semester pertama dan kedua.	0 0%	2 1,4%	26 18,1%	75 52,1%	41 28,5%	4,08
3	Di desa saya ada forum-forum pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pemanfaatan kekayaan milik desa.	0 0%	1 0,7%	13 9,0%	52 36,1%	78 54,2%	4,44
4	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes di desa saya disebarluaskan ke masyarakat desa melalui berbagai media informasi dan komunikasi, seperti papan pengumuman informasi desa atau website resmi desa/kabupaten.	0 0%	1 0,7%	26 18,1%	78 54,2%	39 27,1%	4,08
						Rata-rata	4,15
						Rata-rata Total	4,17

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 3. dapat disimpulkan bahwa baik pemerintah desa telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa dengan baik pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa yang ditunjukkan dengan hasil jawaban dari para responden yang memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,17.

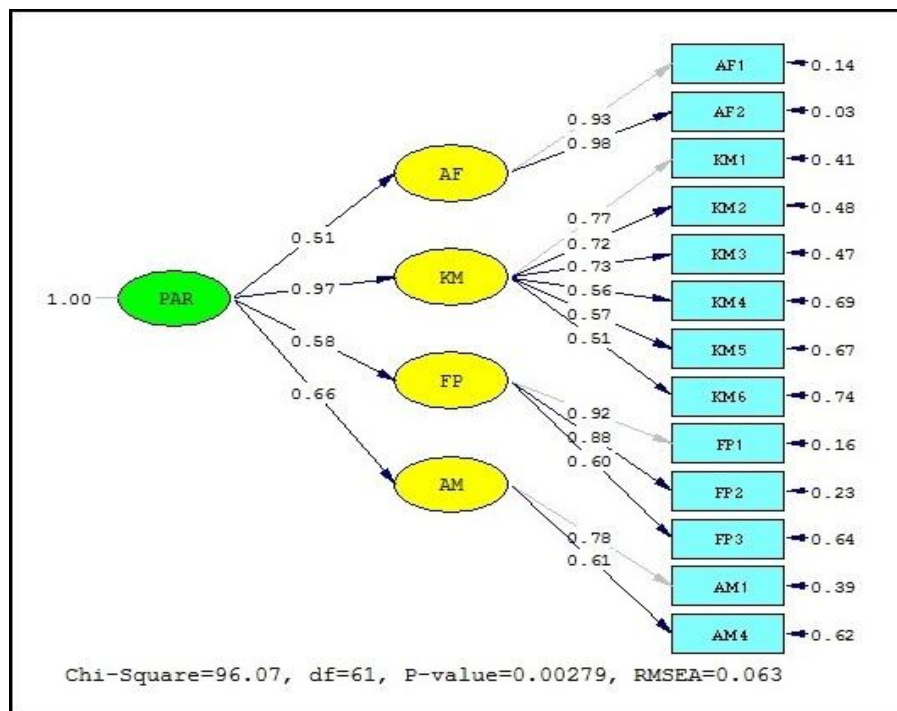
Hasil Analisis Data Penelitian

Hasil analisis data yang diperoleh dari daftar pernyataan yang ditabulasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) melalui bantuan program LISREL 8.80. Metode analisis SEM memiliki beberapa pengujian dalam memeriksa apakah data sudah sesuai dengan model yang diteliti, sehingga suatu penelitian dapat dilanjutkan sesuai dengan data yang berdistribusi normal, valid, reliabel atau dapat diandalkan dan data yang *fit*.

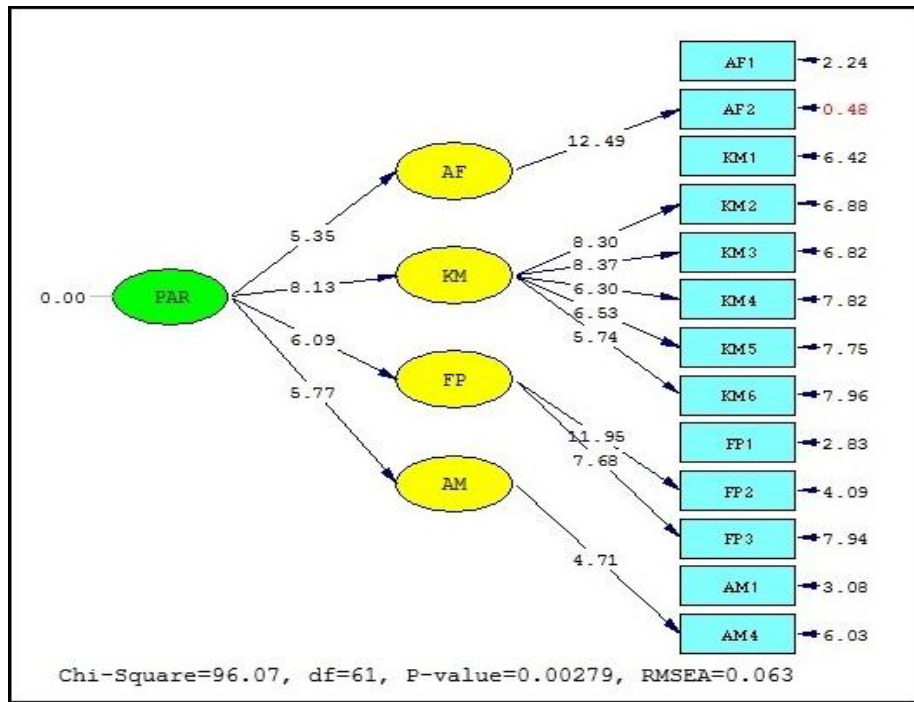
Selanjutnya, pada pengujian hipotesis yang dilakukan yaitu bertujuan untuk mengetahui kebenaran dan realita suatu data.

Hasil Uji Model Pengukuran

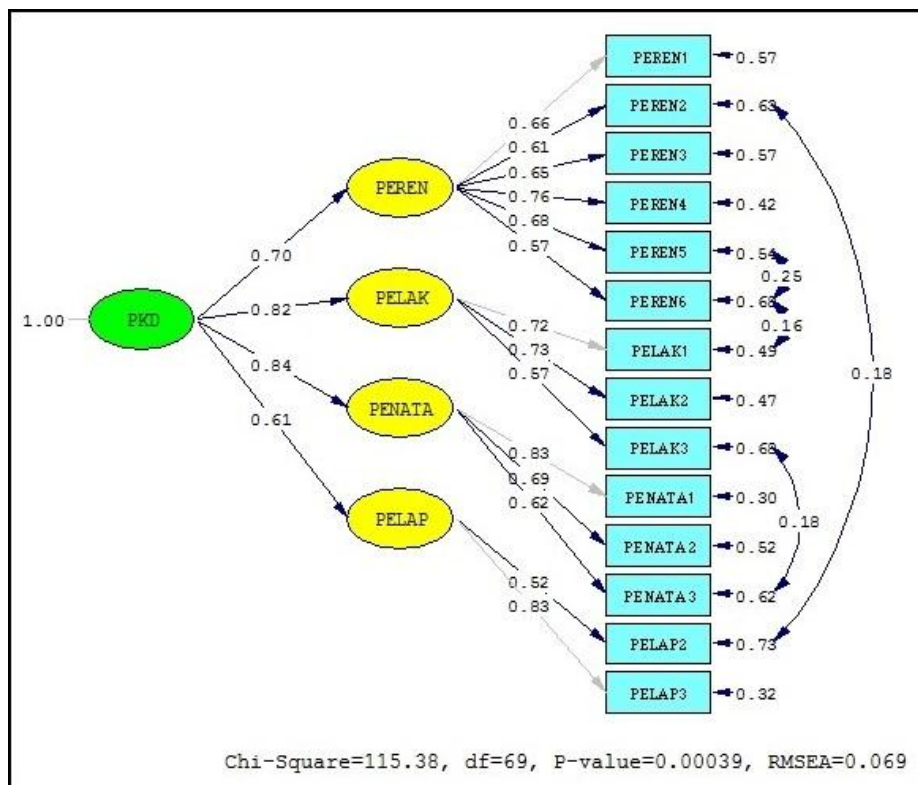
Model Pengukuran (*measurement model*) adalah bagian dari model *Structural Equation Modeling* (SEM) yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya. Model ini menggambarkan sifat pengukuran (reliabilitas dan validitas) dari variabel yang diamati. Pemodelan persamaan struktural menyerupai analisis jalur dengan memberikan estimasi parameter dari hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel yang diamati (Jöreskog & Sörbom, 1996). Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa tepat variabel-variabel *manifest* dapat menjelaskan variabel laten yang ada. Berdasarkan uji *measurement model* variabel tingkat partisipasi masyarakat menggunakan *software Lisrel 8.80* diperoleh hasil sebagai berikut:



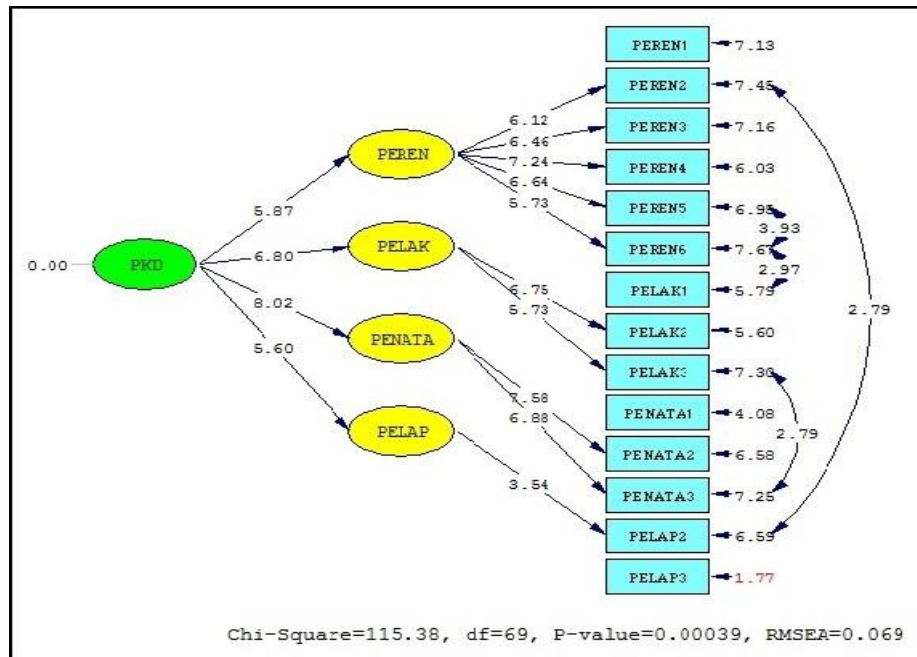
Gambar 2. *Basic Model Standardized Solution* Variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat



Gambar 3. Basic Model T-Value Variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat



Gambar 4. Basic Model Standardized Solution Variabel Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa



Gambar 5. Basic Model T-Value Variabel Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hasil uji model pengukuran dapat dilihat tingkat validitas dan reliabilitas tiap indikator variabel seperti yang ditunjukkan pada tabel 4. Uji reliabilitas dilakukan setelah mengeliminasi semua indikator yang tidak valid. Tingkat reliabilitas dapat dilihat dari nilai *Construct Reliability* (CR). Ukuran CR dihitung dengan rumus sebagai berikut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014:619):

$$CR = \frac{(\sum_{i=1}^n SLF_i)^2}{(\sum_{i=1}^n SLF_i)^2 + \sum_{i=1}^n e_i}$$

Hair et al. (2014:605) menyatakan nilai $CR \geq 0,70$ termasuk *good reliability*, sedangkan nilai CR diantara 0,60 dan 0,70 termasuk *acceptable reliability*, dengan

catatan variabel-variabel indikator menunjukkan validitas yang baik. Cara lainnya untuk melihat reliabilitas adalah melalui *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE turut memperkuat reliabilitas dan hal ini merupakan hasil yang baik, namun menurut Hair et al. (2014:680) cara ini adalah *optional* atau tidak diharuskan, sehingga peneliti lebih cenderung melihat nilai CR sebagai ukuran reliabilitas. Nilai AVE dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AVE = \frac{\sum_{i=1}^n SLF_i^2}{n}$$

Berdasarkan hasil uji mode hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji *Measurement Model*

Variabel	Dimensi	Indikator	Loading Factor $\geq 0,50$	Ket	CR $\geq 0,70$	AVE $\geq 50\%$	Ket
Tingkat Partisipasi Masyarakat	AF	AF1	0,94	Valid	0,95	91%	Reliabel
		AF2	0,97	Valid			
	KM	KM1	0,75	Valid			
		KM2	0,73	Valid			
		KM3	0,71	Valid			
		KM4	0,60	Valid	0,81	42%	<i>Acceptable Reliability</i>
		KM5	0,57	Valid			

Variabel	Dimensi	Indikator	Loading Factor ≥0,50	Ket	CR ≥0,70	AVE ≥50%	Ket	
Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	FP	KM6	0,50	Valid	0,84	66%	Reliabel	
		FP1	0,92	Valid				
		FP2	0,88	Valid				
		FP3	0,60	Valid				
	AM	AM1	0,59	Valid	0,65	49%	Acceptable Reliability	
		AM2	0,53	Valid				
		AM3	0,59	Valid				
	Total			9,56		0,94	56%	Reliabel
	Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	PEREN	PEREN1	0,61	Valid	0,82	43%	Acceptable Reliability
			PEREN2	0,57	Valid			
PEREN3			0,63	Valid				
PEREN4			0,74	Valid				
PEREN5			0,74	Valid				
PEREN6			0,67	Valid				
PELAK		PELAK1	0,73	Valid	0,72	46%	Acceptable Reliability	
		PELAK2	0,67	Valid				
		PELAK3	0,58	Valid				
PENATA		PENATA1	0,79	Valid	0,76	52%	Reliabel	
		PENATA2	0,71	Valid				
		PENATA3	0,65	Valid				
PELAP		PELAP2	0,55	Valid	0,64	48%	Acceptable Reliability	
	PELAP3	0,66	Valid					
Total			9,44		0,92	46%	Reliabel	

Sumber: Data diolah (2017)

Hasil uji *measurement model* tiap dimensi variabel menunjukkan bahwa seluruh dimensi memiliki nilai *loading factor* $\geq 0,50$ dan nilai *CR* $\geq 0,70$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi AF, KM, FP, dan AM merupakan dimensi yang cocok untuk menjadi dimensi variabel eksogen tingkat

partisipasi masyarakat serta PEREN, PELAK, PENATA, dan PELAP merupakan dimensi yang cocok untuk menjadi dimensi bagi variabel endogen kualitas pengelolaan keuangan desa seperti yang ditunjukkan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Measurement Model Dimensi

Variabel	Dimensi	Loading Factor ≥0,50	Keterangan	CR ≥0,70	AVE ≥50%	Keterangan
Tingkat Partisipasi Masyarakat	AF	0,51	Valid	0,78	50%	Reliabel
	KM	0,97	Valid			
	FP	0,58	Valid			
	AM	0,66	Valid			
Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	PEREN	0,70	Valid	0,83	56%	Reliabel
	PELAK	0,82	Valid			
	PENATA	0,84	Valid			
	PELAP	0,61	Valid			

Sumber: Data diolah (2017)

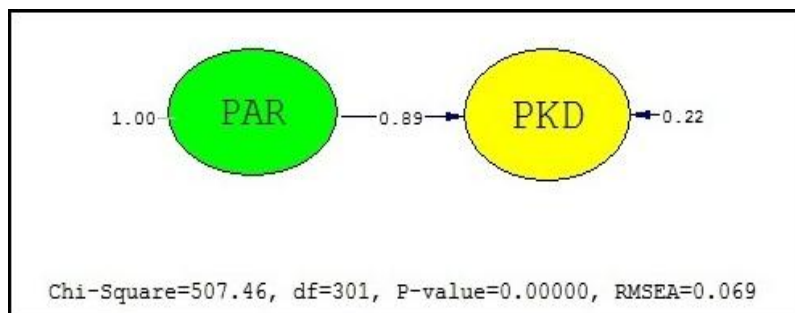
Uji Model Struktural

Setelah peneliti melakukan uji kecocokan model variabel tingkat partisipasi masyarakat dan kualitas pengelolaan keuangan desa, selanjutnya adalah menguji hipotesis pada model strukturalnya pengujian model dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan variabel tingkat partisipasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Dengan pengujian ini juga akan diketahui apakah hipotesis model penelitian diterima atau ditolak.

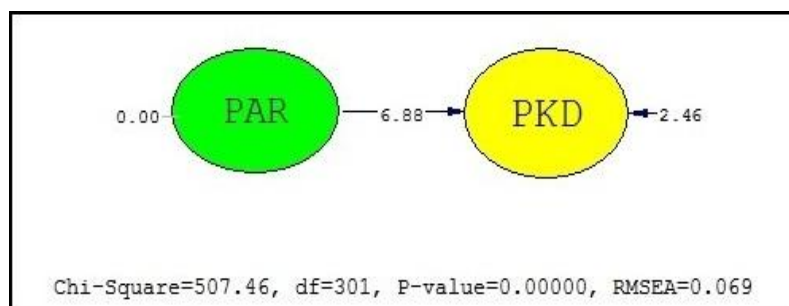
Keseluruhan variabel laten tersebut diukur dengan menggunakan 38 indikator yang telah disusun berupa pertanyaan, yaitu masing-masing variabel laten terdiri dari variabel tingkat partisipasi masyarakat yaitu 4 dimensi dan 19 indikator, serta variabel kualitas pengelolaan keuangan desa juga memiliki 4 dimensi dan 19 indikator. Variabel tingkat partisipasi masyarakat hanya terwakili oleh 13 indikator karena 6 indikator lainnya tidak memenuhi syarat *loading factor* $\geq 0,50$, sehingga indikator tersebut harus dihapuskan dari variabel tingkat partisipasi masyarakat,

namun hal tersebut tidak akan mengurangi substansi dari variabel laten tingkat partisipasi masyarakat karena masih terdapat indikator lain yang dapat mendukung variabel tingkat partisipasi masyarakat. Sama halnya dengan variabel laten kualitas pengelolaan keuangan desa yang hanya diwakili oleh 14 indikator dari 19 indikator karena 5 indikator dari variabel tersebut tidak memenuhi syarat *loading factor* $\geq 0,50$.

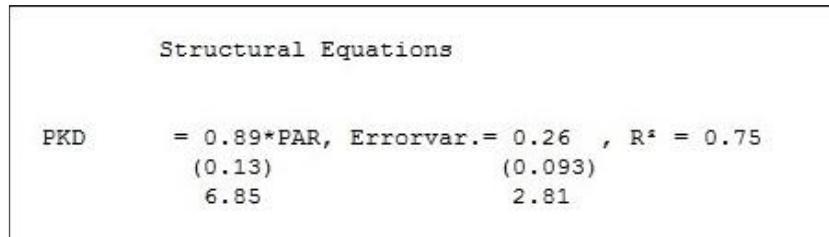
Hasil uji hipotesis terlihat dari *printed out* hasil proses *syntax* dalam rumus persamaan olahan peneliti dan juga terdapat pada *path diagram*. Hubungan yang signifikan harus memenuhi syarat nilai *t-value* harus lebih besar dari *t-tabel*. Hubungan yang signifikan ditandai dengan *t-value* $\geq 1,96$. Nilai R^2 (Koefisien Determinasi) berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Jadi dapat disimpulkan 89% variasi dari variabel kualitas pengelolaan keuangan desa (Y) dapat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat (X) yang dapat dilihat pada gambar 8 berikut:



Gambar 6. Structural Model Standardized Solution



Gambar 7. Structural Model T-Values



Gambar 8. *Structural Equations* Variabel

Hasil perhitungan pengujian kecocokan keseluruhan model dilihat pada tabel 6. Uji kecocokan keseluruhan model pada penelitian ini memiliki *chi-square* sebesar 507,46. Statistik *chi-square* mengikuti uji statistik yang berkaitan dengan persyaratan

signifikan, dimana semakin kecil nilai *chi-square* maka semakin baik pula kecocokan model dengan data dan *p-value* $\geq 0,05$. Ukuran *Goodness of Fit* (GOF) pada model ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Kecocokan Keseluruhan Model

Ukuran GOF	Target Tingkat Kecocokan	Hasil Estimasi	Tingkat Kecocokan
Chi-square	Nilai yang kecil	506,01	
Probabilitas	P>0,05	0,0000	Kurang Baik
NCP	Nilai yang kecil	206,46	
Interval	Interval yang sempit	(148,21 ; 272,59)	Kurang Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,79	Kurang Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,74	Kurang Baik
RMSEA	$\leq 0,08$	0,069	
P (close fit)	$\geq 0,05$		Good Fit
ECVI	Lebih kecil dari nilai ECVI saturated dan independence	I* = 35,45 M* = 4,63 S* = 5,29	Good Fit
AIC	Lebih kecil dari nilai AIC saturated dan independence	I* = 5068,97 M* = 661,46 S* = 756,00	Good Fit
CAIC	Lebih kecil dari nilai CAIC saturated dan independence	I* = 5176,15 M* = 967,13 S* = 2256,59	Good Fit
NFI	$\geq 0,90$	0,90	Good Fit
NNFI	$\geq 0,90$	0,95	Good Fit
CFI	$\geq 0,90$	0,96	Good Fit
IFI	$\geq 0,90$	0,96	Good Fit
RFI	$\geq 0,90$	0,88	Marginal Fit

Sumber: Output *Lisrel* hasil olahan peneliti

Note: *I=Independen, M=Model, S=Saturated

Hasil dari uji kecocokan keseluruhan model menunjukkan 8 ukuran *Goodness of Fit* (GOF) yang menunjukkan kecocokan yang baik (*good fit*), 1 ukuran GOF yang menunjukkan kecocokan yang sedang (*marginal fit*), dan

hanya 4 ukuran GOF yang menunjukkan kecocokan yang kurang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecocokan keseluruhan model adalah baik (*good fit*). Menurut Hair et al. (2014:581), model dikatakan cocok jika

salah satu dari *absolute index* dan *incremental index* memiliki nilai yang *good fit*. Pada penelitian ini, nilai RMSEA yang merupakan salah satu dari *absolute index* memiliki nilai yang fit, sama halnya dengan nilai NFI dan CFI yang merupakan bagian dari *incremental index* juga memiliki nilai yang fit, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan model penelitian ini adalah *good fit*.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Murtono, 2016:33; Wampler, 2002) yang menyatakan bahwa semakin baik pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, maka semakin baik kualitas tata kelola pemerintah desa hal tersebut akan meningkatkan kemandirian desa. Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga harus menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu cara untuk membangun desa menjadi maju dan mandiri, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa sangat penting karena masyarakat sendirilah yang tahu apa yang mereka butuhkan sehingga dengan adanya partisipasi maka setiap pembangunan yang dilakukan di desa merupakan kebutuhan warga desa. Kim & Schachter (2013) juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat menyebabkan pemerintahan yang lebih baik, karena dengan mewujudkan partisipasi akan membuat jarak yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat dan akhirnya menjadikan pejabat publik dan pemerintah lebih bertanggung jawab kepada warganya.

Untuk mewujudkan partisipasi yang efektif, pemerintah desa dan masyarakat harus

mengetahui apa saja perannya. Masyarakat sebagai aktor utama pembangunan harus berperan aktif mewujudkan apa yang mereka inginkan, sedangkan pemerintah berperan menciptakan ruang dan mendorong agar partisipasi itu dapat berjalan. Ahmad Erani Yustika, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam wawancaranya pada majalah Merdesa mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan desa impian yang harus dilakukan adalah pemerintah harus mendelegasikan pengambilan keputusan kunci pada masyarakat desa, sebab tanpa adanya hal tersebut masyarakat desa akan terus terkungkung dan tidak memiliki ruang untuk menyalurkan apa yang sebenarnya mereka inginkan (MERDESA, 2015). Menurut perspektif yang berbeda, partisipasi tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah semata, seperti peningkatan kualitas keputusan karena dapat melakukan aktivitas yang sesuai dengan keinginan masyarakat melainkan partisipasi menjadi proses untuk menstimulasi keahlian masyarakat menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kepercayaan diri serta pengetahuan (Samah & Aref, 2009).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa yang akan berimplikasi pada pembangunan desa yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa.

SIMPULAN

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa yang

berkualitas harus sesuai dengan konsep tata kelola yang baik. Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, maka pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa mutlak dilakukan karena hal adanya keterlibatan masyarakat mulai dari tahapan penyusunan RAPBDesa sampai pengawasan di tingkat lapangan akan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam penggunaan kekayaan desa dan masyarakat juga dapat melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel laten tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa, oleh karena itu teori legitimasi dan teori institusional dapat dibuktikan dalam lingkungan situasional penelitian.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu kecamatan di Propinsi Aceh, walaupun pengambilan sampel dilakukan secara probabilitas namun karena keadaan desa diberbagai daerah memiliki karakteristik tertentu atau mempunyai sifat heterogen yang tinggi, maka hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lemah untuk seluruh daerah di Indonesia. Keterbatasan lain penelitian ini adalah hanya mengamati satu variabel eksogen yang mempengaruhi kualitas pengelolaan dana desa yaitu tingkat partisipasi masyarakat.

Saran

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada wilayah yang lebih luas. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan desa yang lebih kompleks, seperti dengan menambahkan variabel peran pendamping desa. Pada penelitian selanjutnya juga sebaiknya menggunakan *mix method* untuk dapat memahami permasalahan partisipasi dan pengelolaan keuangan desa, sehingga kesimpulan yang diambil mencerminkan kondisi pengelolaan desa yang lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahrori, A. (2011). *Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes (Studi tentang pola hubungan pemerintah desa dan masyarakat desa Pucangsari kecamatan Purwadadi kabupaten Pasuruan)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Beierle, T. C. (1999). Using social goals to evaluate public participation in environmental decisions. *Review of Policy Research*, 16(3- 4), 75–103. <https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.1999.tb00879.x>
- Deegan, C., & Unerman, J. (2006). *Financial Accounting Theory (European E)*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Donaldson, M. (1992). *Human minds: An exploration*. London: Penguin.
- Franklin, A. L., Ho, A. T., & Ebdon, C. (2009). Participatory budgeting in midwestern states: Democratic connection or citizen disconnection? *Public Budgeting & Finance*, 29(3), 52–73.
- Friedmann, J. (1973). The spatial organization of power in the development of urban systems. *Development and Change*, 4(3), 12–50. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1973.tb00643.x>
- Fung, A. (2002). *Empowered participation : Reinventing urban democracy*. Princeton: Princeton University Press.

- Goulet, D. (1989). Participation in development: New avenues. *World Development*, 17(2), 165–178. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X\(89\)90242-8](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X(89)90242-8)
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Harlow, Essex: Pearson Education Limited. <https://doi.org/10.1038/259433b0>
- Halachmi, A., & Holzer, M. (2010). Citizen participation and performance measurement: Operationalizing democracy through better accountability. *Public Administration Quarterly*, 34(3), 378–399. <https://doi.org/10.2307/41288353>
- Healey, P. (1997). *Collaborative planning – Shaping places in fragmented societies*. London: MacMillan.
- Hurst, J. W. (1970). *The legitimacy of the business corporation in the law of the United States, 1780-1970*. Charlottesville: The University Press of Virginia.
- Illsley, B. M. (2003). Fair participation - A Canadian perspective. *Land Use Policy*, 20(3), 265–273. [https://doi.org/10.1016/S0264-8377\(03\)00024-3](https://doi.org/10.1016/S0264-8377(03)00024-3)
- Irvin, R. A., & Stansbury, J. (2004). Citizen participation in decision making: Is it worth the effort? *Public Administration Review*, 64(1), 55–65. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00346.x>
- Joreskog, K. G., & Sorbom, D. (1996). *LISREL 8: User's reference guide*. Chicago: Scientific Software International.
- Kahn, K. F., & Kenney, P. (1997). A model of candidate evaluations in senate elections: The impact of campaign intensity. *Journal of Politics*, 59(4), 1173–1205.
- Kazimoto, P. (2013). Analysis of conflict management and leadership for organizational change. *International Journal of Research in Social Services*, 3(1), 16–25. Retrieved from www.ijsk.org/ijrss
- Kim, S., & Schachter, H. L. (2013). Citizen participation in the budget process and local government accountability. *Public Performance & Management Review*, 36(3), 456–471. <https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576360304>
- Lindblom, C. K. (1994). The implications of organizational legitimacy for corporate social performance and disclosure. In *Critical Perspectives on Accounting Conference*. New York.
- MERDESA. (2015). Tanpa partisipasi, desa impian hanya omong kosong belaka. *Infest*, 11–12. Retrieved from https://issuu.com/infest/docs/merdesa_edisi_ii_mengeja_pengelolaan
- Meyer, J. W., & Scott, W. R. (1983). *Organizational environment: Ritual and rationality*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Murtiono, Y. (2016). *Modul tata kelola keuangan desa*. (H. Prasetya, Ed.) (I). Yogyakarta: Infest. Retrieved from www.infest.or.id
- Nelson, N., & Wright, S. (1995). *Power and participatory development: theory and practice*. London: Intermediate Technology Publications.
- Rahayu, S. (2010). Persepsi pemerintah daerah kota Jambi terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Sistem*, 12(2), 29–33.
- Ramdan, D., Setiawan, D., Murtiono, Y., Widiyatmoko, P., Muryaman, Z., & Rusim, S. (2015). *Panduan: Peran aktif warga masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa*. Jakarta: Peace Through Development in Disadvantaged Area.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa (2014). [https://doi.org/10.1016/0034-5687\(85\)90130-6](https://doi.org/10.1016/0034-5687(85)90130-6)

- Robert, P. (2002). *Democracies in flux: The evolution of social capital in contemporary society*. New York: Oxford University Press.
- Samah, A. A., & Aref, F. (2009). People's participation in community development: A case study in a planned village settlement in Malaysia. *World Rural Observations*, 1(2), 45–54.
- Sopannah. (2010). Studi fenomenologis: Menguak partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 14(1), 1–21.
- Suebvises, P. (2018). Social capital, citizen participation in public administration, and public sector performance in Thailand. *World Development*, 109, 236–248.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.007>
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 21–28.
- Thomas, J. C. (1995). *Public participation in public decisions: New skills and strategies for public managers*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Wampler, B. (2002). *Brazil ' s participatory budgeting: Motivations, evidence, claims, and research strategies*. The World Bank. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/EXTECAREGTOPSOCDEV/Resources/WB_FinaldraftWampler2002.pdf
- Waskitojati, D., Handoyo, S., Wuryaningsih, C. D. Prasetyo, H. D., & Luwihono, S. (2016). *Policy Note: Model Proses Penganggaran Pembangunan Desa Secara Partisipatif*. Jawa Tengah: Lembaga Percik Salatiga.
- Zucker, L. G. (1987). Institutional Theories of Organization. *Annual Review of Sociology*, 13(1), 443–464.
<https://doi.org/10.1146/annurev.so.13.080187.002303>